

Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

Jl. Ir. Soekarno Hatta No 117 Tulungagung - 66261

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

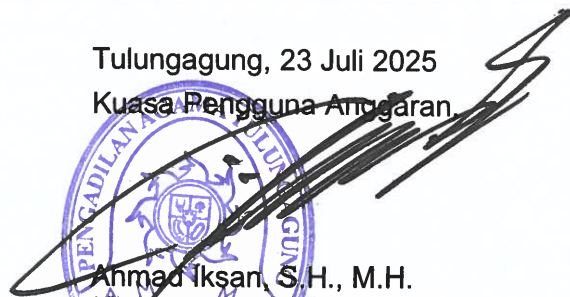
Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tulungagung, 23 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran


Ahmad Iksan, S.H., M.H.
NIP.198610152006041004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

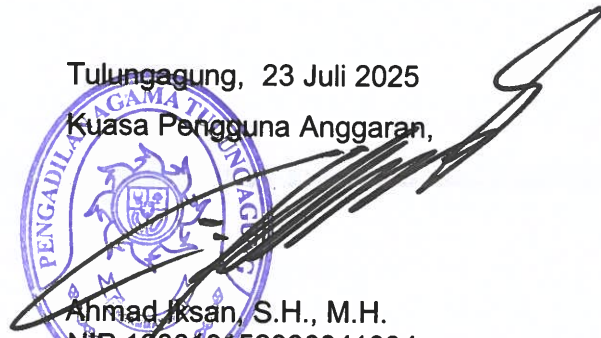
Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung – Jawa Timur 66261
Telp. 0355-336516 Fax.0355-336121 e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tulungagung, 23 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ahmad Iksan, S.H., M.H.
NIP 198610152006041004

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp22.537.012,00 atau mencapai 131,04 persen dari estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.198.000,00

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5.189.534.449,00 atau mencapai 57,52 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.021.414.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.934.314.347,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp31.852.183,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.934.314.347,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp558.824.618,00 dan Rp26.407.341.912,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp27.358.423,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.860.309.849,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.832.951.426,00). Untuk Kegiatan Non Operasional sebesar Rp74,00 dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5.832.951.352,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp27.073.295.827,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.832.951.352,00), ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp. 0,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.166.997.437,00, mengalami Penurunan Ekuitas sebesar Rp(665.953.915),00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp26.407.341.912,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025		% Realisasi thd Anggaran	30 Juni 2024		% Realisasi thd Anggaran
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	17.198.000,00	22.537.012,00	131,04	32.201.000,00	16.467.270,00	51,14
JUMLAH PENDAPATAN		17.198.000,00	22.537.012,00	131,04	32.201.000,00	16.467.270,00	51,14
BELANJA	B.2.						
Belanja Operasi							
Belanja Pegawai	B.3	7.109.455.000,00	4.355.524.755,00	61,26	6.644.228.000,00	3.420.410.630,00	51,48
Belanja Barang	B.4	1.858.959.000,00	781.109.694,00	42,02	1.915.628.000,00	927.886.330,00	48,44
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		8.968.414.000,00	5.136.634.449,00	57,27	8.559.856.000,00	4.348.296.960,00	50,80
Belanja Modal							
Belanja Tanah	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	53.000.000,00	52.900.000,00	99,81	0,00	0,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal lainnya	B.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		53.000.000,00	52.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		9.021.414.000,00	5.189.534.449,00	57,52	8.559.856.000,00	4.348.296.960,00	50,80

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25	30-Jun-24
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000,00	51.000.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.4	201.483,00	146.599,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	0,00	0,00
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0,00	0,00
Persediaan	C.9	1.650.700,00	4.789.625,00
Jumlah Aset Lancar		31.852.183,00	55.936.224,00
PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
Tagihan TP/TGR	C.10	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	C.13	19.834.552.000,00	19.834.552.000,00
Peralatan dan Mesin	C.14	3.117.305.308,00	3.046.955.308,00
Gedung dan Bangunan	C.15	8.017.338.431,00	8.017.338.431,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.17	5.552.079,00	5.552.079,00
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(4.040.433.471,00)	(3.655.072.460,00)
Jumlah Aset Tetap		26.934.314.347,00	27.249.325.358,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C.21	176.000,00	176.000,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(176.000,00)	(176.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		26.966.166.530,00	27.305.261.582,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	30.000.000,00	51.000.000,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	528.617.618,00	433.209.787,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	0,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	207.000,00	8.501.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		558.824.618,00	492.710.787,00
JUMLAH KEWAJIBAN		558.824.618,00	492.710.787,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	26.407.341.912,00	26.812.550.795,00
JUMLAH EKUITAS		26.407.341.912,00	26.812.550.795,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.966.166.530,00	27.305.261.582,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	27.358.423,00	19.906.297,00
JUMLAH PENDAPATAN		27.358.423,00	19.906.297,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.819.178.777,00	3.784.454.417,00
Beban Persediaan	D.3	4.443.540,00	6.833.700,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	710.170.348,00	707.570.620,00
Beban Pemeliharaan	D.5	107.489.255,00	249.651.482,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26.036.800,00	40.358.272,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	192.991.129,00	191.202.234,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.11	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		5.860.309.849,00	4.980.070.725,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.832.951.426,00)	(4.960.164.428,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		74,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00
Jumlah		74,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.832.951.352,00)	(4.960.164.428,00)
POS LUAR BIASA	D.13	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.832.951.352,00)	(4.960.164.428,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMATULUNGAGUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
EKUITAS AWAL	E.1	27.073.295.827,00	27.417.559.607,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.832.951.352,00)	(4.960.164.252,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENANMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.5	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6	0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.7	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET	E.8	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.9	0,00	0,00
LAIN-LAIN	E.10	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.11	5.166.997.437,00	4.355.155.440,00
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.12	(665.953.915,00)	(605.008.812,00)
EKUITAS AKHIR		26.407.341.912,00	26.812.550.795,00

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1A merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117

Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung”**.

Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung, dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya rendah bagi masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Tulungagung adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Dalam melaksanakan visi dan misi diatas, wajib bagi aparaturnya Pengadilan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai utama pada Mahkamah Agung yaitu :

1. Kemandirian;
2. Integritas;
3. Kejujuran;
4. Akuntabilitas;
5. Responsibilitas;
6. Keterbukaan;
7. Ketidak-berpihakan;
8. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut

TUJUAN STRATEGIS

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

- Terpinggirkan;
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR;
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung Semester I tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp9.021.414.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	PER 30 JUNI 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32.201.000,00	32.201.000,00
Jumlah Pendapatan	32.201.000,00	32.201.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	6.644.228.000,00	7.109.455.000,00
Belanja Barang	1.867.959.000,00	1.858.959.000,00
Belanja Modal	53.000.000,00	53.000.000,00
Jumlah Belanja	8.565.187.000,00	9.021.414.000,00

Realisasi
Pendapatan
Rp22.537.012,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp22.537.012,00 atau mencapai 131,04 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.198.000,00. Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Per 30 Juni 2025		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Sewa	17.198.000,00	22.537.012,00	131,04
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	-
Jumlah	17.198.000	22.537.012	131,04

Realisasi Pendapatan Sewa per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.069.742,00 atau 36,86 persen dibanding realisasi periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan kenaikan nominal sewa ATM Bank Jatim dan penambahan sewa 2 (dua) buah kantin makanan dibanding periode sebelumnya berdasarkan SK KPKNL Perihal Persetujuan sewa Barang Milik Negara Nomor: S-5/MK.6/KNL.1003/2025 Tanggal 09 Januari 2025 dan SK KPKNL Perihal Persetujuan sewa Barang Milik Negara (BMN) Nomor: S-6/MK.6/KNL.1003/2025

Tanggal 10 Januari 2025. Perbandingan realisasi PNBPN 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan Sewa	22.537.012,00	16.467.270,00	6.069.742,00	36,86
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.537.012,00	16.467.270,00	6.069.742,00	36,86

Realisasi Belanja
Negara
Rp5.189.534.449,00

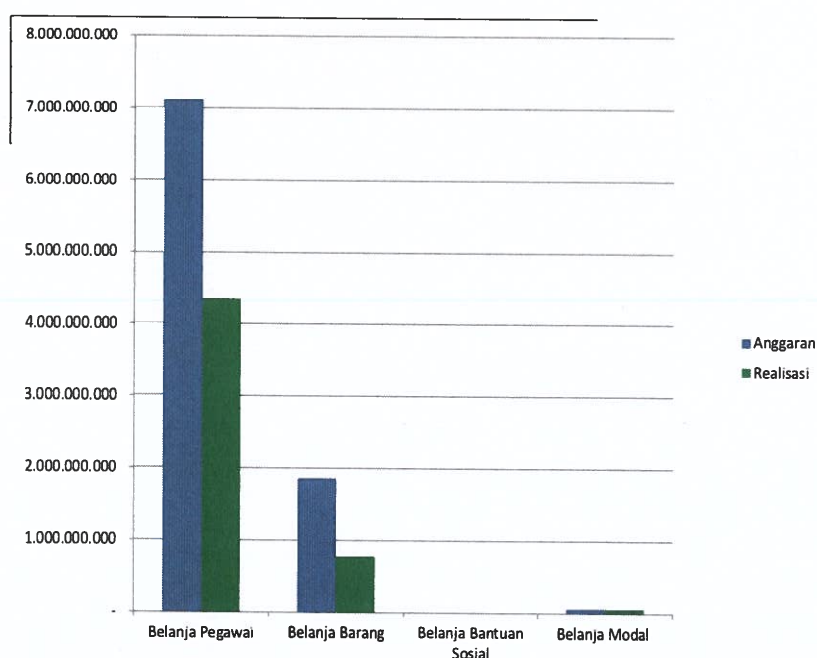
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5.189.534.449,00 atau sebesar 57,52 persen dari anggaran belanja sebesar Rp9.021.414.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	7.109.455.000,00	4.355.524.755,00	61,26
52	Belanja Barang	1.858.959.000,00	781.109.694,00	42,02
53	Belanja Modal	53.000.000,00	52.900.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Kotor	9.021.414.000,00	5.189.534.449,00	57,52
	Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.021.414.000,00	5.189.534.449,00	57,52

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp788.337.489,00 atau sebesar 16,21 persen dibandingkan realisasi belanja per 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena kenaikan belanja pegawai pada komponen Tunjangan Fungsional Pejabat Negara dan Tunjangan Pajak Penghasilan Pejabat Negara pada Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Agama Tulungagung.

Perbandingan Realisasi Belanja Per per 30 Juni 2025 dan 2024

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Jenis Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
		30 Juni 2025	30 Juni 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	4.355.524.755,00	3.420.410.630,00	935.114.125,00	21,47%
52	Belanja Barang	781.109.694,00	927.886.330,00	- 146.776.636,00	-18,79%
53	Belanja Modal	52.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		5.189.534.449,00	4.348.296.960,00	788.337.489,00	16,21%

Belanja Pegawai
Rp4.355.524.755,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.355.524.755,00 dan Rp3.420.772.057,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 27,34 persen dari periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena kenaikan pada komponen Tunjangan Fungsional Pejabat Negara dan Tunjangan Pajak Penghasilan.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realiasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Rp	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.213.111.100	1.197.596.200,00	15.514.900,00	1,30
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.384,00	15.015,00	(1.631,00)	(10,86)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91.912.040,00	90.413.540,00	1.498.500,00	1,66
Belanja Tunj. Anak PNS	22.485.858,00	19.505.700,00	2.980.158,00	15,28
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.960.000,00	23.040.000,00	(10.080.000,00)	-43,75
Belanja Tunj. Fungsional PNS	48.440.000,00	1.619.715.000,00	(1.571.275.000,00)	(97,01)
Belanja Tunj. PPh PNS	9.949.805,00	310.103.782,00	(300.153.977,00)	(96,79)
Belanja Tunj. Beras PNS	52.214.820,00	48.593.820,00	3.621.000,00	7,45
Belanja Uang Makan	110.167.000,00	101.019.000,00	9.148.000,00	9,06
Belanja Tunjangan Umum PNS	11.905.000,00	10.770.000,00	1.135.000,00	10,54
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	492.814.601,00	0,00	492.814.601,00	0,00
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.290.800.000,00	0,00	2.290.800.000,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	4.356.773.608,00	3.420.772.057,00	936.001.551,00	27,36
Pengembalian Belanja Pegawai	1.248.853,00	361.427,00	887.426,00	245,53
Jumlah Belanja	4.355.524.755,00	3.420.410.630,00	935.114.125,00	27,34

Belanja Barang
Rp781.109.694,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp781.109.694,00 dan Rp927.886.330,00. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 15,82 persen disbanding Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas pada TA 2025.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian Jenis Belanja	Realiasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Rp	%
Belanja Barang Operasional	597.251.266,00	591.160.000,00	6.091.266,00	1,03
Belanja Barang Non Operasional	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Belanja Jasa	52.196.499,00	55.487.701,00	(3.291.202,00)	(5,93)
Belanja Pemeliharaan	105.500.129,00	241.198.357,00	(135.698.228,00)	(56,26)
Belanja Perjalanan	26.036.800,00	40.040.272,00	(14.003.472,00)	(34,97)
Jumlah Belanja Kotor	781.109.694,00	927.886.330,00	(146.776.636,00)	(15,82)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	781.109.694,00	927.886.330,00	(293.553.272,00)	(15,82)

Penurunan realisasi Belanja Barang juga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, halaman, serta pemeliharaan mesin dan juga kendaraan dinas yang belum dapat dilaksanakan pada Semester 1 TA 2025 karena implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja APBN pada bulan Februari hingga Maret 2025.

Belanja Modal
Tanah Rp0,00

B.5 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024. Sehingga tidak ada realisasi per 30 Juni 2025 maupun 30 Juni 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp52.900.000,00

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 yaitu sebesar Rp52.900.000,00 dan per 30 Juni 2024 adalah Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi per 30 Juni 2025	Realisasi per 30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
CCTV	0,00	0,00	0,00
Pengadaan PC	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Laptop	0,00	0,00	0,00
Pengadaan printer	0,00	0,00	0,00
Pengadaan router	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Scanner	0,00	0,00	0,00
Pengadaan finger print	0,00	0,00	0,00
Pengadaan TV LED	0,00	0,00	0,00
Pengadaan UPS	0,00	0,00	0,00
Pengadaan AC	52.900.000,00	0,00	100,00
Pengadaan Generator Set	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	52.900.000,00	0,00	100,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	52.900.000,00	0,00	100,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024. Pada TA 2025 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Pengadilan Agama Tulungagung.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Per 30 Juni 2025	REALISASI Per 30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0,00

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran maupun aktivitas pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024, Sehingga tidak ada realisasi per 30 Juni 2025 maupun 30 Juni 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi per 30 Juni 2025	Realisasi per 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

*Belanja Modal
Lainnya Rp0,00*

B.10 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024, Sehingga tidak ada realisasi Per 30 Juni 2025 maupun TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp31.852.183,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp31.852.183,00 dan Rp55.936.224,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp51.000.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
Bank BRI	0,00	0,00
Uang Tunai	30.000.000,00	51.000.000,00
Jumlah	30.000.000,00	51.000.000,00

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam Rupiah)

Keterangan	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
Bank BRI	0,00	0,00
Uang Tunai	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung

jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam Rupiah)

Jenis	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
Belanja yang masih harus dibayar/utang pihak ketiga yang masih berada di rekening bank bendahara	0,00	0,00
Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Piutang Bukan Pajak
Rp201.483,00

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp201.483,00 dan Rp146.599,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
Piutang PNBPN atas Sewa Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua yang dipotong melalui Gaji SPM	201.483,00	146.599,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	201.483,00	146.599,00

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar
1	-	-	0,00

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Nihil				0,00
					0,00
Jumlah					0,00

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp0,00

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	-	-	-	0,00	0,00

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka
Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari belanja sewa *web hosting*, *domain*, dan layanan

video conference dibayar dimuka (*prepaid*) yang telah dibayarkan secara penuh. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

(dalam Rupiah)

Jenis	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
Persekot Gaji	0,00	0,00
Pembayaran Sewa Hosting dan Domain	0,00	0,00
Pembayaran Lisensi Video Conference	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Persediaan
Rp1.650.700,00

C.1.9. Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.650.700,00 dan Rp4.789.625,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

Persediaan	Per 30 Juni 2025	Mutasi	Per 30 Juni 2024
Barang Konsumsi	1.152.050,00	- 2.077.250,00	3.229.300,00
Bahan untuk Pemeliharaan	498.650,00	- 1.061.675,00	1.560.325,00
Jumlah	1.650.700,00	- 3.138.925,00	4.789.625,00

Semua jenis persediaan tersebut pada saat tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.1.10. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
1	NIHIL	0,00	0,00
		0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

TPA
Rp0,00

C.1.11. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2024
1	NIHIL	0,00	0,00
		0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0,00

C.1.12. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0,00	0,00%	0,00
Kurang Lancar	0,00	0,00%	0,00
Diragukan	0,00	0,00%	0,00
Macet	0,00	0,00%	0,00
Jumlah	0,00	0,00%	0,00
Tagihan PA			
Lancar	0,00	0,00%	0,00
Kurang Lancar	0,00	0,00%	0,00
Diragukan	0,00	0,00%	0,00
Macet		0,00%	0,00
Jumlah	0,00	0,00%	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0,00	0,00

Aset Tetap
Rp26.934.314.347,00

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.934.314.347,00 dan Rp 27.249.325.358,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Urusan Administrasi berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah
Rp19.834.552.000,00

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Tulungagung per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp19.834.552.000,00 dan Rp19.834.552.000,00. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	19.834.552.000,00
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset Tetap	0,00
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0,00
Saldo per tanggal 30 Sept 2024	19.834.552.000,00

Rincian saldo Tanah per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

(dalam Rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.196 m2	Jl Ir. Soekarno Hatta No. 5, Tulungagung	18.362.737.000,00
2	724 m2	Jl. Pahlawan III No 1, Tulungagung	836.629.000,00
3	544 m2	Jl. Pahlawan III No 1, Tulungagung	635.186.000,00
Jumlah			19.834.552.000,00

Peralatan dan Mesin
Rp3.117.305.308,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp3.117.305.308,00 dan Rp3.046.955.308,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.064.405.308
Mutasi tambah:	0,00
Transfer Masuk	52.900.000
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	3.117.305.308
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(2.687.490.891)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	429.814.417

Adanya mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sampai dengan 30 Juni 2025.

Gedung dan Bangunan
Rp8.017.338.431,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp8.017.338.431,00 dan Rp8.017.338.431,00 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	8.017.338.431,00
Mutasi tambah:	
Revaluasi Nilai Aset Tetap	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	8.017.338.431,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	- 1.352.942.580,00
Nilai Buku per 30 Juni 2025	6.664.395.851,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan sehingga disajikan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	
Revaluasi Nilai Aset Tetap	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0,00
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	0,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp5.552.079,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp5.552.079,00 dan Rp5.552.079,00. Aset tetap tersebut berupa barang ekstrakomtabel dikarenakan barang tersebut mempunyai nilai harga dibawah nilai kapitalisasi. Terdapat mutasi tambah aset tetap ini Per 30 Juni 2025. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah atas aset tetap ini Per 30 Juni 2025. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
aset Tetap
Rp4.040.433.471,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp4.040.433.471,00 dan Rp3.655.072.460,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.117.305.308,00	- 2.687.490.891,00	429.814.417,00
2	Gedung dan Bangunan	8.017.338.431,00	- 1.352.942.580,00	6.664.395.851,00
3	Aset Tetap Lainnya	5.552.079,00	0,00	5.552.079,00
Akumulasi Penyusutan		11.140.195.818,00	- 4.040.433.471,00	7.099.762.347,00

Aset Lainnya
Rp176.000,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 adalah Rp176.000,00 dan Rp176.000,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan dan disajikan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
NIHIL	0,00
	0,00
Jumlah	0,00

Aset Lain-Lain
Rp176.000,00

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp176.000,00 dan Rp176.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	176.000,00
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	0,00
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0,00
- penghapusan BMN	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	176.000,00
Akumulasi Penyusutan	(176.000,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,00

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	5.552.079,00	0,00	5.552.079,00
Jumlah	5.552.079,00	0,00	5.552.079,00

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp558.824.618,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp558.824.618,00 dan Rp492.710.787,00. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Uang Muka dari KPPN
Rp30.000.000,00

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp51.000.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp528.617.618,00

C.4.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp528.617.618,00 dan Rp433.209.787,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	528.617.618,00	
Belanja barang yang masih harus dibayar	207.000,00	
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	0,00	
Total	528.824.618,00	

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,00

C.4.3. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada pelaporan ini. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Kantin dan Koperasi	0,00
ATM Bank Jatim	0,00
ATM BRI	0,00
Jumlah	0,00

Ekuitas
Rp26.407.341.912,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.407.341.912,00 dan Rp26.812.550.795,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp207.000,00

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp207.000,00 dan Rp8.501.000,00. Utang Yang Belum Ditagihkan adalah transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Per 30 Juni 2025	Realisasi Per 30 Juni 2024
Utang Yang Belum Ditagihkan	207.000,00	8.501.000,00
Jumlah	207.000,00	8.501.000,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp27.358.423,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp27.358.423,00 dan Rp19.906.297,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	27.358.423,00	19.906.297,00	37,44
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	27.358.423,00	19.906.297,00	37,44

Pendapatan Sewa Pengadilan Agama Tulungagung dari pendapatan sewa tanah, sewa gedung dan bangunan, dan sewa rumah dinas tahun 2025.

Beban Pegawai
Rp4.819.178.777,00
0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.819.178.777,00 dan Rp3.784.454.417,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.359.936.560,00	1.336.574.080,00	1,75
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.784,00	15.289,00	(3,30)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	101.284.870,00	100.386.110,00	0,90
4	Beban Tunj. Anak PNS	25.312.688,00	21.613.032,00	17,12
5	Beban Tunj. Struktural PNS	14.580.000,00	25.920.000,00	(43,75)
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	54.495.000,00	1.799.550.000,00	(96,97)
7	Beban Tunj. PPh PNS	10.052.873,00	333.331.846,00	(96,98)
8	Beban Tunj. Beras PNS	58.587.780,00	54.170.160,00	8,16
9	Beban Uang Makan PNS	110.167.000,00	101.019.000,00	9,06
10	Beban Tunjangan Umum PNS	13.555.000,00	11.874.900,00	14,15
11	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	534.092.222,00	0,00	100,00
12	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.537.100.000,00	0,00	100,00
Jumlah		4.819.178.777,00	3.784.454.417,00	27,34

Beban Persediaan
Rp4.443.540,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.443.540,00 dan Rp6.833.700,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	4.443.540,00	6.833.700,00	(34,98)
Jumlah Beban Persediaan	4.443.540,00	6.833.700,00	(34,98)

Beban Barang dan
Jasa
Rp710.170.348,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp710.170.348,00 dan Rp707.570.620,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Telepon	498.652,00	505.820,00	(1,42)
Beban Barang Keperluan perkantoran	633.793.696,00	623.949.500,00	1,58
Beban Jasa Pengiriman Surat Dinas	261.500,00	522.000,00	(49,90)
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22.800.000,00	26.664.000,00	(14,49)
Beban Peralatan Mesin Ekstrakomptabel	0,00	0,00	0,00
Beban Belanja Bahan	125.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa	52.691.500,00	55.929.300,00	0,00
Jumlah	710.170.348,00	707.570.620,00	0,37

Terdapat kenaikan pada Beban Barang Keperluan Perkantoran, hal ini disebabkan karena kenaikan kebutuhan barang keperluan kantor pada Satuan Kerja.

Beban
Pemeliharaan
Rp107.489.255,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp107.489.255,00 dan Rp249.651.482,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.436.600,00	127.011.450,00	(60,29)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	38.195.100,00	1(00,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.063.529,00	79.438.807,00	(30,68)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.989.126,00	5.006.125,00	(60,27)
Jumlah	107.489.255,00	249.651.482,00	(56,94)

Terdapat penurunan untuk Beban Pemeliharaan pada semester I TA 2025 secara keseluruhan sebesar 56,94% dibanding semester I TA 2024.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp26.036.800,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.036.800,00 dan Rp40.358.272,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	26.036.800,00	39.758.272,00	(34,51)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	600.000,00	1(00,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	26.036.800,00	40.358.272,00	(35,49)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp192.991.129,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp192.991.129,00 dan Rp191.202.234,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni

2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	102.014.843,00	100.225.948,00	1,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90.976.286,00	90.976.286,00	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan	192.991.129,00	191.202.234,00	0,94
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	192.991.129,00	191.202.234,00	0,94

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Beban Lain-lain
Rp0,00

D.8 Beban Lain-lain

Tidak terdapat jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp74,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp74,00 dan Rp0,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0,00		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00
Surplus / (Defisit) Penyelesaian Kewajiban JP	0,00		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban JP	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit) Dari Kgt Non Operasional lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	74,00	0,00	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	74,00	0,00	100,00

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL karena terdapat pegawai yang terdapat kekurangan kenaikan pangkat reguler periode Desember 2024 yang diajukan pada TA 2025 di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

Pos Luar Biasa
R0,00

D.10 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
Rp27.073.295.827,
00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.073.295.827,00 dan Rp27.417.559.607,00

*Surplus (Defisit) LO
Rp5.832.951.352,0
0*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.832.951.352,00 dan Rp4.960.164.252,00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0,00*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0,00.

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp0,00*

E.4 Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,00*

E.5 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0,00

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.6 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan per per 30 Juni 2025 dan 2024. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0,00
Suku Cadang	0,00
Barang Persediaan Lainnya	0,00
Jumlah	0,00

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.7 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Selisih Revaluasi
Aset Rp0,00

E.8 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0,00

E.9 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar
Entitas
Rp5.166.997.437,0
0

E.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp5.166.997.437,00 dan Rp4.355.155.440,00. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan Ke Entitas Lain	5.189.534.449,00
Diterima Dari Entitas Lain	22.537.012,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	- 665.953.915,00
Jumlah	5.166.997.437,00

Ekuitas Akhir Rp.
Rp26.407.341.912,
00

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.407.341.912,00 dan Rp26.812.550.795,00.

Rincian Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Ekuitas Akhir	26.407.341.912,00	26.812.550.795,00
	Jumlah	26.407.341.912,00	26.812.550.795,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1) Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung

Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2025 terdiri dari satu orang yang menerima, mengelola dan menatausahakan uang persediaan (UP) baik pada brankas dan rekening giro. Adapun rekening giro yang dibuka oleh Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

N o.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo
1	BPG 150 PENGADILAN AGAMA BRI	BRI 653244013811000	0

2) Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Tulungagung Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.01.2.401381/2025 tanggal 02 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp8.556.187.000,00 (*delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- DIPA Awal

PROGRAM	AKUN	DIPA AWAL (Rp)
1071.EBB.951	532111	53.000.000,00
6986.EBA.962	521252	700.000,00
6986.EBA.994	511111	2.253.192.000,00
	511119	31.000,00
	511121	182.257.000,00
	511122	48.562.000,00
	511123	40.320.000,00
	511124	3.139.610.000,00
	511125	525.866.000,00

	511126	105.804.000,00
	511129	327.361.000,00
	511151	21.225.000,00
	521111	1.070.155.000,00
	521811	15.499.000,00
	521114	3.480.000,00
	522112	3.480.000,00
	522141	2.550.000,00
	523111	306.465.000,00
	523119	38.200.000,00
	523121	184.310.000,00
	521115	61.920.000,00
	524111	60.480.000,00
	524113	4.500.000,00
	522141	106.920.000,00
6986.EBD.953	521211	300.000,00
JUMLAH PAGU		8.556.187.000,00

- Revisi DIPA tanggal 13 Januari 2025 (tidak ada perubahan Pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA	MENJADI
6986.EBA.994	511111	1.953.143.000,00	1.738.893.000,00
	511121	156.367.000,00	140.000.000,00
	511122	41.742.000,00	35.000.000,00
	511124	3.139.610.000,00	1.400.000.000,00
	511125	525.866.000,00	104.000.000,00
	511126	105.804.000,00	85.000.000,00
	511129	327.361.000,00	290.000.000,00
	511324	0,00	357.000.000,00
	511339	0,00	2.100.000.000,00
JUMLAH		8.556.187.000,00	8.556.187.000,00

- Revisi DIPA tanggal 22 April 2025 (tidak terdapat perubahan Pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA	MENJADI
6986.EBA.994	511111	2.000.000.000,00	1.920.000.000,00
	511129	290.000.000,00	310.000.000,00
	511324	51.000.000,00	111.000.000,00
JUMLAH		8.556.187.000,00	8.556.187.000,00

- Revisi DIPA tanggal 05 Mei 2025 tidak terdapat perubahan Pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA	MENJADI
6986.EBA.994	524111	9.000.000,00	9.450.000,00
	524113	4.500.000,00	4.050.000,00
JUMLAH		8.556.187.000,00	8.556.187.000,00

- Revisi DIPA tanggal 19 Mei 2025 (terdapat perubahan pagu semula Rp8.556.187.000,00 menjadi Rp9.021.414.000,00 bertambah sebesar Rp465.227.000,00 untuk mengakomodir Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara dan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara)

PROGRAM	AKUN	SEMULA	MENJADI
6986.EBA.994	511111	1.920.000.000,00	1.255.000.000,00
	511123	34.560.000,00	29.560.000,00
	511125	104.000.000,00	64.000.000,00
	511151	17.750.000,00	22.750.000,00
	511324	411.000.000,00	626.427.000,00
	511339	2.400.000.000,00	3.354.800.000,00
JUMLAH		8.556.187.000,00	9.021.414.000,00

3) Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Manual

Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus dan Jurnal Manual pada SAKTI Tahun 2025:

- Pada 02 Januari 2025 dilakukan Jurnal Balik atas Beban langganan telepon atas pemakaian bulan Desember 2024;
- Pada 02 Januari 2025 dilakukan Jurnal Balik Pendapatan diterima di muka atas sewa kantin, atm bank BRI, dan Bank Jatim;
- Pada 02 Januari 2025 dilakukan Jurnal Balik Belanja dibayar di muka atas sewa lisensi *video conference*, *web hosting* dan *domain*.

4) Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 130/KPA.W13-A11/SK.KU.1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran yang berada di Lingkungan Pengadilan Agama

Tulungagung, telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Ahmad Iksan, S.H., M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Riky Yohana, S.E., M.H.
Pejabat	:	Ahmad Iksan, S.H., M.H.
Penandatangan/Penguji SPM		
Bendahara Pengeluaran	:	Dita Amelia, A.Md.Ak.
Bendahara Penerimaan	:	Megatru Raka Pamungkas, S.E.

Lampiran A1

Pengadilan Agama Tulungagung
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Tot. Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2025	Per 30-06-2025	Per 30-06-2025	Per 30-06-2025
A	Tanah						
1	Tanah	-	19.834.552.000,00	0,00	0,00	0,00	19.834.552.000
	Jumlah		19.834.552.000,00	0,00	0,00	0,00	19.834.552.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	10	200.000.000,00	71.428.570,00	14.285.714,00	85.714.284,00	114.285.716,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	514.111.703,00	514.111.703,00	0,00	514.111.703,00	0,00
3	Alat Kantor	5	188.136.100,00	156.828.600,00	4.472.500,00	161.301.100,00	26.835.000,00
4	Alat Rumah Tangga	5	873.009.140,00	700.538.330,00	25.654.162,00	726.192.492,00	146.816.648,00
5	Alat Studio	5	106.788.320,00	79.947.410,00	5.368.182,00	85.315.592,00	21.472.728,00
6	Alat Komunikasi	5	18.327.000,00	18.327.000,00	0,00	18.327.000,00	0,00
7	Komputer Unit	4	965.170.210,00	826.580.350,00	42.689.535,00	869.269.885,00	95.900.325,00
8	Peralatan Komputer	4	251.762.835,00	217.714.085,00	9.544.750,00	227.258.835,00	24.504.000,00
	Jumlah		3.117.305.308,00	2.585.476.048,00	102.014.843,00	2.687.490.891,00	429.814.417,00
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.920.792.431,00	1.053.826.186,00	76.109.135,00	1.129.935.321,00	5.790.857.110,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	658.322.000,00	138.422.656,00	9.887.333,00	148.309.989,00	510.012.011,00
3	Tugu/Tanda Batas	50	438.224.000,00	69.717.452,00	4.979.818,00	74.697.270,00	363.526.730,00
	Jumlah		8.017.338.431,00	1.261.966.294,00	90.976.286,00	1.352.942.580,00	6.664.395.851,00
D	Jaringan						
	Jumlah						
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
	Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Jalan dan Jembatan	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Irigasi	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan tercetak	0	5.552.079,00	0,00	0,00	0,00	5.552.079,00
	Jumlah		5.552.079,00	0,00	0,00	0,00	5.552.079,00
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alat Kantor	5	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
3	Alat Rumah Tangga	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alat Studio	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alat Komunikasi	5	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6	Komputer Unit	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Peralatan Komputer	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
Total			30.974.923.818,00	3.847.442.342,00	192.991.129,00	4.040.609.471,00	26.934.314.347,00

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401381

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 2:21 PM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,198,000	22,537,012	5,339,012	131.04	32,201,000	16,467,270	(15,733,730)	51.14
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,198,000	22,537,012	5,339,012	131.04	32,201,000	16,467,270	(15,733,730)	51.14
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	17,198,000	22,537,012	5,339,012	131.04	32,201,000	16,467,270	(15,733,730)	51.14
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	9,021,414,000	5,189,534,449	(3,831,879,551)	57.52	8,559,856,000	4,348,296,960	(4,211,559,040)	50.8
1. Belanja Pegawai	7,109,455,000	4,355,524,755	(2,753,930,245)	61.26	6,644,228,000	3,420,410,630	(3,223,817,370)	51.48
2. Belanja Barang	1,858,959,000	781,109,694	(1,077,849,306)	42.02	1,915,628,000	927,886,330	(987,741,670)	48.44
3. Belanja Modal	53,000,000	52,900,000	(100,000)	99.81	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401381

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 2:21 PM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025			2024				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,021,414,000	5,189,534,449	(3,831,879,551)	57.52	8,559,856,000	4,348,296,960	(4,211,559,040)	50.8
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025
Perangung Jawab UAKPA
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
ASMA IKSAN, S.H., M.H.
NIP 198610152006041004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 2:21 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	27,358,423	19,906,297	7,452,126	37.436
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	27,358,423	19,906,297	7,452,126	37.436
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	27,358,423	19,906,297	7,452,126	37.436
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,819,178,777	3,784,454,417	1,034,724,360	27.341
Beban Persediaan	4,443,540	6,833,700	(2,390,160)	(34.976)
Beban Barang dan Jasa	710,170,348	707,570,620	2,599,728	0.367
Beban Pemeliharaan	107,489,255	249,651,482	(142,162,227)	(56.944)
Beban Perjalanan Dinas	26,036,800	40,358,272	(14,321,472)	(35.486)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:21 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	192,991,129	191,202,234	1,788,895	0.936
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,860,309,849	4,980,070,725	880,239,124	17.675
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,832,951,426)	(4,960,164,428)	(872,786,998)	17.596
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	74	176	(102)	(57.955)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	74	176	(102)	(57.955)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	74	176	(102)	(57.955)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,832,951,352)	(4,960,164,252)	(872,787,100)	17.596
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,832,951,352)	(4,960,164,252)	(872,787,100)	17.596

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KASUBBAS UMUM DAN KEBANCAAN
AHMAD RIZAN, S.H., M.H.
NIP. 198610152006041004



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	201,483	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,152,050	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	498,650	0
0.0	131111	Tanah	19,834,552,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,117,305,308	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,017,338,431	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,552,079	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,687,490,891
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,352,942,580
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	176,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	176,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	463,654,022
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	64,963,596
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	207,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,189,534,449
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	22,537,012	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,073,295,827
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,955,457
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	402,966
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	74
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,359,936,560	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14,784	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	101,284,870	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	25,312,688	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14,580,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	54,495,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	10,052,873	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	58,587,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	110,167,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,555,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	534,092,222	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,537,100,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	633,793,696	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	261,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,800,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:22 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	125,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	498,652	0
3.0	522141	Beban Sewa	52,691,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,436,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,063,529	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26,036,800	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	102,014,843	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90,976,286	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,443,540	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,989,126	0
JUMLAH			36,889,622,862	36,889,622,862

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

AHMAD IKSAN, S.H., M.H.
NIP 198610152006041004



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	2,069,300	(2,069,300)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	201,483	0	201,483	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	201,483	0	201,483	0.00
Persediaan	1,650,700	1,516,700	134,000	8.83
JUMLAH ASET LANCAR	31,852,183	3,586,000	28,266,183	788.24
ASET TETAP				
Tanah	19,834,552,000	19,834,552,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,117,305,308	3,064,405,308	52,900,000	1.73
Gedung dan Bangunan	8,017,338,431	8,017,338,431	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,552,079	5,552,079	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,040,433,471)	(3,847,442,342)	(192,991,129)	5.02
JUMLAH ASET TETAP	26,934,314,347	27,074,405,476	(140,091,129)	(0.52)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	176,000	176,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(176,000)	(176,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	26,966,166,530	27,077,991,476	(111,824,946)	(0.41)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	528,617,618	75,647	528,541,971	698,695.22
Utang Yang Belum Ditagihkan	207,000	0	207,000	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	4,620,002	(4,620,002)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	558,824,618	4,695,649	554,128,969	11,800.90
JUMLAH KEWAJIBAN	558,824,618	4,695,649	554,128,969	11,800.90
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	26,407,341,912	27,073,295,827	(665,953,915)	(2.46)
JUMLAH EKUITAS	26,407,341,912	27,073,295,827	(665,953,915)	(2.46)
JUMLAH EKUITAS	26,407,341,912	27,073,295,827	(665,953,915)	(2.46)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,966,166,530	27,077,991,476	(111,824,946)	(0.41)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM

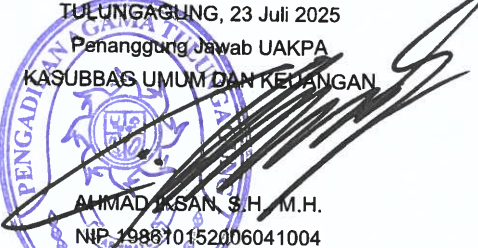
Tgl Cetak : 23/07/25 2:22 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KASUBBAS UMUM DAN KEHANGAN

AHMAD KUSAN, S.H., M.H.
NIP. 198810152006041004



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:21 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	27,073,295,827	27,417,559,607	(344,263,780)	(1.26)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,832,951,352)	(4,960,164,252)	(872,787,100)	17.6
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,166,997,437	4,355,155,440	811,841,997	18.64
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(665,953,915)	(605,008,812)	(60,945,103)	10.07
EKUITAS AKHIR	26,407,341,912	26,812,550,795	(405,208,883)	(1.51)

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

AHMAD PRASANI, S.H., M.H.
NIP. 198610152006041004